



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 030/ 117/ /2020

TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PENGGUNA  
PADA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN REMBANG  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjukan Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Barang Pengguna tersebut diktum KESATU berwenang dan bertanggungjawab :
- a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
  - b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
  - c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
  - d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
  - e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;

- i. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
- g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
- j. pengajuan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
- k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- l. membuat kartu Inventarisasi Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
- m. memberi label barang milik daerah;
- n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
- o. melakukan stock opname barang persediaan;
- p. menyimpan dokumen dan menyimpan asli/ fotocopy/ salinan dokumen penatausahaan;
- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Pengurus Barang Pengguna tersebut diktum KESATU secara administrative bertanggungjawab kepada Kepala Dinas/ Atasan Langsung selaku Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang selaku Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Rembang  
Pada tanggal 15 Januari 2020

BUPATI REMBANG,



Tanggal : 15 Januari 2020

DAFTAR NAMA PENGURUS BARANG PADA PERANGKAT DAERAH DI  
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA/NIP	INSTANSI	ATASAN LANGSUNG
1	2	3	4
1.	Mokhammad Arifin Nip.19840905 200901 1 001	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah
2.	Suyanto Nip. 19811014 201406 1 001	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD
3.	Khumaidi Nip.19830223 201406 1 001	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
4.	Kusman Nip.19650612 199203 1 009	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan
5.	Didik Galih Prasetya, ST Nip.19801223 200903 1 008	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.	Tin Tisna Asri Aryani, SE Nip. 19750626 201001 2 014	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
7.	Saniban Nip.19700714 200901 1 005	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas Perhubungan
8.	Lasipan Nip.19690429 2010701 1 008	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
9.	Karmijan Nip.19680627 200906 1 002	Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil	Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil
10.	Hendarto Budi Setyawan, SH Nip.19640514 199208 1 007	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
11.	Nurul Hidayati Nip.19710223 199208 2 001	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
12.	Julvan Taufik, SP Nip.19810621 200701 1 003	Dinas Pertanian dan Pangan	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
13.	Hariyani, S.Kel Nip. 19830228 200903 2 013	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
14.	Wibowo Priambodo,S.Kom Nip.19820418 200903 1 003	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
15.	Sunaryo Nip.19740615 200801 1 017	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
16.	Bagus Sriyadi , S.Kom Nip. 19770802 201001 1 013	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
17.	Sujono Nip.19660605 199303 1 019	Inpektorat	Inspektur
18.	Agung Budi Prastio, A.Md Nip.19841116 201001 1 012	BadanKepegawaian Daerah	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
19.	Kunarwi Nip.19630111 198503 1 007	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

	Moch Abdul Rochim Nip.19841017 201001 1 003	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja	Kepala Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
21.	Sumarlan Nip. 19741217 200801 1 006	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
22.	Titian Agustina Suminar, S.Kom Nip. 19830821 201001 2 014	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
23.	Heru Setiawan Nip. 19810514 200801 1 004	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
24.	Ikhsan Rofingi Nip. 19790922 200901 1 003	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
25.	Hartana, SE Nip. 19821004 200801 1 006	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
26.	Kunarti, SH Nip. 19680711 199103 2 008	Rumah Sakit Umum dr.R.Soetrasno	Kepala Rumah Sakit Umum dr.R.Soetrasno
27.	Siti Cholifah, SH Nip. 19700529 200701 2 006	Kecamatan Rembang	Camat Rembang
28.	Paidi Nip. 19691103 200906 1 001	Kecamatan Kaliori	Camat Kaliori
29.	Punisih Nip. 19831007 200901 2 009	Kecamatan Lasem	Camat Lasem
30.	Fauzan Nip. 19740726 201001 1 006	Kecamatan Sluke	Camat Sluke
31.	Isbandi, SE Nip. 19770517 200701 1 010	Kecamatan Pancur	Camat Pancur
32.	Khodir Nip. 19650614 200701 1 024	Kecamatan Pamotan	Camat Pamotan
33.	Dwi Edi Priono Nip. 19650503 199503 1 001	Kecamatan Sale	Camat Sale
34.	Subroto Nip. 19720221 200906 1 002	Kecamatan Gunem	Camat Gunem
35.	Idham Kholid Nip. 19691207 200801 1 009	Kecamatan Kragan	Camat Kragan
36.	Ahmad Khairil Anwar Nip. 19811012 200701 1 005	Kecamatan Sarang	Camat Sarang
37.	Laiyinatul Muthiyah, A.Md Nip. 19861203 201001 2 023	Kecamatan Sedan	Camat Sedan
38.	Rupadi Nip. 19760924 200701 1 007	Kecamatan Sulang	Camat Sulang
39.	Hariningsih, SE Nip. 19670312 200701 2 026	Kecamatan Sumber	Camat Sumber
40.	Aris Wahyudi Nip. 19780617 200701 1 007	Kecamatan Bulu	Camat Bulu

